

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Oleh

AGUS DEDI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan bahwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Perempuan, Pemilu Umum Legislatif

PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan aspek yang penting dalam demokrasi, di katakan bahwa partisipasi adalah aspek penting dalam demokrasi karena keputusan politik yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah dan otomatis untuk kepentingan bersama dalam hal ini masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi dari keputusan politik itu sendiri.

Dari data rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik dalam pemilu legislatif masih kurang yaitu untuk DPD, DPR dan DPRD: Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) kaum perempuan di Kelurahan Cigembor berjumlah 1.775 Orang data di peroleh dari KPUD Ciamis, Kemudian

yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.583 Orang data pemilih legislatif Tahun 2014, Jadi jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk kaum perempuan di Kelurahan Cigembor berjumlah 192 Orang dengan persentase 9 % yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi dari penjelasan tersebut ada beberapa kendala atau indikator permasalahannya antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya tentang waktu atau tempatnya pencoblosan tetapi harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut, kemudian sosialisasi yang harusnya dilakukan 6 kali ini hanya dilakukan 4 kali dan sosialisasi

melalui slogan atau poster kurang terlalu dipahami oleh kaum perempuan.

2. Waktu.

Waktu penyelenggaraan berbenturan dengan kesibukan aktivitas dari calon pemilih, kaum perempuan di Kelurahan Cigembor ada yang bekerja di kota dan kuliah di kota, karena waktu libur yang hanya satu hari jadi mereka memilih untuk bekerja dan kuliah tanpa harus pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

3. Kurang mengenal sosok Calon

Kaum perempuan di Kelurahan Cigembor masih ada yang tidak mengenal sosok calon karena terlalu banyak calon legislatif jadi membingungkan kaum perempuan untuk memilih.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam pemilu umum legislatif di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Tahun 2014 ? 2) Bagaimana hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian partisipasi politik perempuan dalam pemilu umum legislatif di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Tahun 2014 ? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses partisipasi politik perempuan dalam pemilu umum legislatif di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis ?

METODE

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Dalam penelitian tentang Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan-ungkapan, kata-kata dan kalimat dan dapat di golongkan dalam bentuk kategori-kategori.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informan, yaitu perwakilan masyarakat khususnya kaum perempuan dari setiap Tempat

Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Cigembor yang mengikuti pemilihan umum legislatif dan yang tidak mengikuti pemilihan umum legislatif, perwakilan anggota PPK (panitia pemilihan kecamatan), dan perwakilan anggota PPS (panitia pemungutan suara) Berdasarkan uraian di atas maka sumber data yang akan di wawancara adalah sebanyak 93 informan.

Untuk pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan bagi keperluan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (interview)

Teknik analisis data disesuaikan dengan pendapat Miles dan Huberman, (2010:129) yang menyebutkan bahwa : “Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”.

LANDASAN TEORITIS

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dirinya maupun dari luar dirinya dalam seluruh proses kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Faulks (1999 :133) mengatakan bahwa : Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, maka partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menunjang dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang demokratis.

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu seperti yang di kemukakan James Rosenau antara lain :

- a. Gaya partisipasi
- b. Motif partisipasi
- c. Konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik.

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tertentu dipengaruhi berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Menurut Huntington dan Nelson (Efriza, 2012:198) mengatakan bahwa pengukuran tingkat partisipasi dari:

1. Status sosial ekonomi
2. Penilaian terhadap sistem politik
3. Mobilitas individual
4. Perasaan terhadap sistem politik
5. Homogenitas kelompok sosial
6. Keterlibatan dalam organisasi

Pemilihan Umum

Dasar yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pemilihan Umum di katakan sebagai proses, cara pembuatan memilih yang di lakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.

Menurut Sudiharjo (Efriza, 2012:359) mengatakan bahwa:

Pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1) Ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

a. Ikut serta dalam kampanye

Menurut Keith Faulks, (2012 : 164) : Partisipasi Politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan yang tidak ikut serta dalam proses kampanye dan secara tidak langsung maka kaum perempuan di kelurahan

Cigembor masih kurang partisipasinya dalam hal ini.

b. Keikutsertaan perempuan dalam panitia pengawas pemilihan umum

Berdasarkan hasil penelitian informan memberikan keterangan bahwa keikutsertaan perempuan dalam panitia pengawas pemilihan umum di Kelurahan Cigembor kaum perempuan sudah menunjukkan angka baik, di buktikan dengan adanya beberapa kaum perempuan yang ikut serta menjadi panitia pengawas pemilihan umum legislatif tahun 2014

c. Berapa banyak jumlah saksi perempuan di PPS atau TPS

Berdasarkan hasil penelitian informan memberikan keterangan bahwa berapa banyak jumlah saksi perempuan di PPS atau TPS, informan menjawab masih sedikit kaum perempuan yang menjadi saksi setidaknya hanya ada 7 saksi yang terbagi ke dalam 9 TPS hal ini dikarenakan kaum perempuan di Kelurahan Cigembor lebih memilih hanya menjadi penonton saja tanpa harus repot-repot untuk menjadi saksi.

d. Menyampaikan aspirasi kaum perempuan di kelurahan Cigembor.

Menurut Kevin R. Hardwick, (2012) :

Partisipasi Politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam hal ini kaum perempuan di Kelurahan Cigembor belum ada yang berani menyampaikan aspirasi dengan baik menurut jawaban dari informan sampai saat ini belum ada yang berani menyampaikan aspirasi tersebut.

e. Berapa banyak jumlah juru kampanye perempuan.

Menurut Keith Faulks, (2012 : 164) : Partisipasi Politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan yang tidak ikut serta menjadi juru kampanye dan secara tidak

MODERAT

Modern dan Demokratis

langsung maka kaum perempuan di kelurahan cigembor masih kurang dalam hal ini.

2) Partisipasi Secara Langsung

a. Memberikan suara dalam pemilu secara langsung berdasarkan hati nurani.

Menurut Surbakti, 2010: 180 partisipasi politik adalah "Keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya."

Namun pada kenyataannya masih ada kaum perempuan yang tidak terlibat dan tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani dan masih ada yang menggunakan berdasarkan main belakang.

b. Adanya sosialisasi dari PPK, PPS dan TPS.

Menurut Surbakti (2010) : Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian informan memberikan keterangan bahwa dari pihak PPK, PPS dan TPS memberikan sosialisasi menggunakan poster-poster, slogan atau dari mulut ke telinga.

c. Kaum perempuan menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, (2012) : Partisipasi Politik adalah batasan dari partisipasi politik sebagai "keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik."

Namun pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan yang tidak terlibat dan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

d. Kaum perempuan datang ke tempat pemungutan suara secara langsung untuk memberikan hak pilihnya.

Menurut Closky, Nie dan Verba (2008 : 373) :

Partisipasi Politik adalah kegiatan warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang di ambil oleh mereka. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa, dengan pemilu, kepentingan mereka terakomodasi dalam lembaga politik yang ada atau sekurang-kurangnya diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian informan memberikan keterangan bahwa kaum perempuan datang secara langsung ke tempat pemungutan suara walaupun masih ada kaum

perempuan di Kelurahan Cigembor yang tidak memberikan hak pilihnya dengan beberapa alasan.

e. Keterlibatan perempuan dalam penyebaran alat peraga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penyebaran alat peraga sangat di butuhkan sekali sebab pedoman tata cara alat peraga tersebut sangat membantu dalam kesuksesan pemilihan umum legislatif, tetapi keterlibatan kaum perempuan dalam penyebaran alat peraga di Kelurahan Cigembor masih sedikit yang peduli akan hal tersebut.

3) Partisipasi Secara Tidak Langsung

a. Melakukan diskusi beserta rekan-rekan secara tidak formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam melakukan diskusi beserta rekan-rekan secara tidak formal kebanyakan kaum perempuan di Kelurahan Cigembor melakukannya dengan cara bergosip dengan kaum perempuan yang lainya terhadap situasi politik yang ada. Langkah tersebut sebenarnya sangat di sayangkan sekali karena setidaknya aspirasi atau keinginan kaum perempuan di sanalah muncul jika ada yang menampung keinginan tersebut maka aspirasi kaum perempuan di Kelurahan Cigembor dapat tersalurkan. dalam hal ini pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasinya.

b. Mempengaruhi kaum perempuan agar ikut serta menggunakan hak pilih.

PPK , PPS dan TPS sebagai penyelenggara pemilu memang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf q, pasal 9 ayat 1 huruf n, pasal 10 ayat 1 huruf o, pasal 44 huruf l, dan pasal 45 huruf p, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan teori tersebut penyelenggara pemilu harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai sosialisasi pemilu tersebut.

c. Melihat atau mendengar di media masa tentang berita politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa kaum perempuan di Kelurahan Cigembor memang melihat dan mendengar berita tentang politik di media masa, Namun hanya sekedar melihat dan mendengar saja dan

tidak ada tanggapan lain mengenai berita politik tersebut.

d. Kaum perempuan mendukung setiap hasil keputusan pemerintah dari hasil pemilihan umum.

Efriza, 2012: 182 Tipologi Partisipasi Politik adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Aktif merupakan partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi Pasif merupakan partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Partisipasi apatis atau golongan putih.

Apa yang sudah menjadi hasil keputusan dari pemerintah, kaum perempuan akan menerimanya karena dalam hal ini kaum perempuan percaya sepenuhnya kepada pemerintah dan juga kepada panitia penyelenggaraan pemilihan umum dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

e. Memberikan pendapat terhadap situasi politik yang ada.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
- c. berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan inapun tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam hal ini kaum perempuan berhak memberikan pendapat terhadap situasi politik yang ada, Namun kebanyakan dari mereka hanya sekedar bergosip.

Hambatan-hambatan yang Ditemukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

1. Masih rendahnya pengetahuan politik kaum perempuan di Kelurahan Cigembor dalam pemilihan umum legislatif hal tersebut di buktikan bahwa masyarakat hanya sebatas menggunakan hak pilihnya.
2. Dengan banyaknya jumlah calon yang menyulitkan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam memilih.
3. Masih ada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik walau dengan berbagai alasan artinya bahwa peran aktif kaum perempuan masih di katakan rendah.
4. Kaum perempuan masih kurang tanggap dengan situasi politik yang ada, kebanyakan dari mereka hanya menanggapi dengan hal biasa.

Dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kaum perempuan di Kelurahan Cigembor masih belum memahami tujuan pemilihan umum legislatif yang sebenarnya, dengan demikian masih ada beberapa hambatan yang di hadapi.

Upaya-upaya yang ditemukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

1. Memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor agar kaum perempuan di Kelurahan Cigembor paham dengan betul arti berpolitik yang sebenarnya.
2. Seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih.
3. Kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.
4. Memberikan pemahaman kepada kaum perempuan agar kaum perempuan sadar akan situasi politik yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis", Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum berjalan secara maksimal walau dari 1.775 Orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 192 Orang, di katakan belum maksimal karena masih terdapat kaum perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik
2. Mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Masih rendahnya pengetahuan politik kaum perempuan di Kelurahan Cigembor dalam pemilihan umum legislatif hal tersebut di buktikan bahwa masyarakat hanya sebatas menggunakan hak pilihnya, dengan banyaknya jumlah calon yang menyulitkan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam memilih, masih ada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik walau dengan berbagai alasan artinya bahwa peran aktif kaum perempuan masih di katakan rendah, kaum perempuan masih kurang tanggap dengan situasi politik yang ada, kebanyakan dari mereka hanya menanggapi dengan hal biasa.
3. Mengenai upaya-upaya yang di lakukan untuk meningkatkan yang partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara

pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan, memberikan pemahaman kepada kaum perempuan agar kaum perempuan sadar akan situasi politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung : Alfabeta,cv
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Panca Orde Baru*.
- Pito, Toni Andrianus, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung : Nuansa
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Melcong, Lexy J. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo
- Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung : Cv Pusaka Setia
- Sastropoetra, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, da Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : P.T. Alumni
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Dokumen-dokumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KPUD Kabupaten Ciamis, *Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif Kecamatan Ciamis tahun 2014*